BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Bab-bab terdahulu, maka dapat kami simpulkan bahwa pembentukan citra positif pemerintah melaui program kerja Sub Bagian Kesejahteraan pada Bagian Sosial Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, cukup baik. Karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Menurut pendapat beberapa orang dari sekian banyak masyarakat yang berada diwilayah Kotamadya Bandung Sub Bagian Kesejahteraan ternyata telah mendapatkan opini yang positif dari masyarakat (penyumbang opini), dengan demikian berarti program kerja Sub Bagian Kesejahteraan mampu membentuk citra positif Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung.

Apabila disesuaikan dengan teori yang ada bahwa " opini bukan fakta " dan dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan memperhatikan unsur opini publik, *human relations* dan *group relations* yang tercakup dalam tehnik berkomunikasi, maka kami belum dapat memprediksi apakah Sub Bagian Kesejahteraan pada Bagian Sosial Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung telah mampu memberikan citra positif dimata masyarakat Kotamadya Bandung.

Apabila dikaji lebih dalam, pemerintah hanya mengandalkan upaya pemberian bantuan secara fisik untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, sehingga pembentukan citrapun sangat cepat dan bersifat tidak tetap.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Kepada Pemerintah Dati II Bandung

Dalam Struktur organisasi menurut kami HUMAS sebaiknya ditempatkan dibawah walikota. Dengan kata lain, dibentuk Asisten Utama yang menangani Hubungan dengan publik intern dan ekstern Pemda Kotamadya Bandung, dengan mengganti Humas menjadi *Purel (Public Relations)* atau Hubungan Publik. Dimana *Purel* tersebut, membawahi Asisten I, II dan III untuk lebih mempotensialisasikan tugas dan fungsi Pelaksanaan *Public Relations* yang sesungguhnya. Selain itu. Humas memberikan kesan Pemerintah hanya melakukan hubungan dengan masyarakat saja tanpa menghiraukan publik Internalnya (karyawan) sehingga komunikasi yang ditampilkan adalah *One Way Communination*, bukan *Two Way Communications* yang harus mampu menghubungkan Pemerintah, karyawannya serta masyarakat. Agar mampu membangun kota Bandung menjadi yang paling baik.

Selanjutnya keberadaan Tata Usaha sangat sulit untuk dimengerti. Apabila dilihat dari kegiatan sehari-hari pada jam kerja, ternyata Tata Usaha tidak hanya diperlukan atau diperbantukan pada bagian POPW. Karena itu menurut hemat kami, akan lebih baik apabila Tata Usaha diletakkan pada bagian khusus Tata Usaha, atau diliap Sub bagian dilengkapi dengan Urusan Tata Usaha.

4.2.2 Saran Kepada IGI-LPKIG

1. Dalam pengadaan surat permohonan Praktek Kerja, akan lebih baik apabila disertai dengan nama jurusan dan daftar mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa yang akan melakukan Kerja praktek. Sehingga mereka dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan pelajaran yang telah ia dapatkan, untuk lebih mengefektifkan tujuan dari pengadaan kerja praktek.
2. Dikarenakan sistem pendidikan Diploma I yang disiapkan untuk menjadi lulusan yang mampu terjun langsung kedunia kerja sesuai profesinya, maka kami sarankan proses perkuliahan mencakup 30% teori dan 70% praktek kecuali pada mata kuliah komputer.
3. Untuk lebih memperjelas potensi IGI-LPKIG akan lebih baik, bila IGI-LPKIG bekerjasama dengan perusahaan yang dapat menampung lulusan IGI-LPKIG yang berprestasi sehingga mahasiswa IGI akan lebih bersemangat dalam meningkatkan kualitasnya dan kebanggaan terhadap IGI-LPKIG pun akan tumbuh dengan sendirinya.
4. Menurut hemat kami, sebaiknya IGI-LPKIG memiliki staf *Purel (Public Relations)* untuk mempromosikan dan menjaga citra IGI-LPKIG sehingga IGI-LPKIG mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang lebih memiliki citra positif dari masyarakat, atau bahkan mampu bersaing dengan PTN dan PTS yang ada di Indonesia.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I